



## KPU Buka Surat Suara Tak Sah untuk Diteliti

**YOGYA, TRIBUN** - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta kembali membuka berkas surat suara tidak sah. Pembukaan ini bukan karena sengketa, namun un-

tuk penelitian agar menjadi evaluasi ke depannya.

Menurut Ketua KPU Kota Yogyakarta Wawan Budiyanto, sebanyak 2.000 surat suara tidak sah dibuka

kembali sebagai sampel penelitian.

"Ini merupakan riset lanjutan, sebelumnya mereka

● ke halaman 14

## KPU Buka Surat Suara Tak

• Sambungan Hal 13

telah melakukan riset yang serupa usai Pilpres 2014 lalu," ujar Wawan saat menerima utusan dari Pusat Riset Politik dan Pemerintahan (PolGov) UGM di Gudang KPU Jalan Tegalturi, Giwangan, Umbulharjo, Selasa (19/9).

Disebutkannya, surat suara tidak sah saat Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Yogyakarta 2017 mencapai enam persen, yakni sebanyak 14.355. Angka ini dinilai cukup besar, sehingga analisisnya bisa memberikan kemanfaatan dalam penyelenggaraan pemilu di Kota Yogyakarta mendatang.

Wawan menegaskan, dikeluarkan surat suara tidak sah ini tidak ada kaitannya dengan proses Pilwali Yogyakarta 2017. Ini murni untuk riset dengan KPU Kota Yogyakarta sebagai pembantu.

"Kita di sini hanya memfasilitasi teman-teman dari PolGov karena mereka yang punya kepentingan melakukan riset dan ini tidak mengubah apapun hasil dari Pilwali 2017," ungkap Wawan.

Dia memastikan bahwa surat suara tidak sah yang menjadi aset negara ini tidak akan disalahgunakan atau dibawa pergi. Peneliti hanya diperbolehkan memindai surat suara sebagai data penelitian.

Penelitian ini juga diawasi oleh kepolisian dan Panwas Kota Yogyakarta. Ia berharap hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi atau masukan bagi KPU dalam penyelenggaraan



TRIBUN JOGJA/BERAR GILANG RAMADAN

**SURAT SUARA** - Peneliti dari PolGov UGM menginventaris surat suara yang tidak sah di Gudang KPU Giwangan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Selasa (19/9)

pemilu yang lebih sukses kedepannya.

### Petakan Penyebab

Peneliti PolGov UGM, Desi Rahmawati mengatakan, ini merupakan penelitian kedua kalinya dilakukan. Pada tahun 2016 dilakukan penelitian surat suara tidak sah dari Pemilihan Presiden 2014 dari lima kabupaten-kota se-DIY.

"Kita bisa memetakan surat suara tidak sah yang ternyata variasinya banyak di lapangan. Saat penelitian Pilpres lalu kita temukan 11 pola yang membuat sebuah surat suara menjadi tidak sah," ujar Desi, Selasa (19/9).

Angka tersebut lebih banyak ketimbang jenis surat suara tidak sah yang ada dalam panduan pelaksanaan pemilu oleh KPU. Padahal dari KPU hanya memiliki empat tanda surat suara tidak sah dalam buku panduan mereka.

Dijelaskannya, penelitian tentang temuan pola tersebut memiliki dua kepentingan, yakni sebagai database akademik dan yang lebih penting untuk bisa mengungkapkan penyebab surat

suara menjadi tidak sah.

"Surat suara tidak sah itu bisa karena kualitas kertas atau resistensi masyarakat itu sendiri," ungkap Desi.

Contoh-contoh surat suara tidak sah yang pernah ditemukan antara lain dicoblos pada kedua pasangan calon, dicoblos tembus namun tanpa membuka kertas suara, dicoblos dengan benar namun ternyata surat suara rusak, hingga kertas suara yang dicoret-coret atau diberi gambar.

Dalam penelitian ini, PolGov mengambil sampel surat suara tidak sah mencapai 2.000 buah dari total sebanyak 14.355. Penelitian sendiri akan memakan waktu hingga tiga hari lamanya. Hasil penelitian ini juga bisa menjadi acuan atau rekomendasi KPU dalam penyelenggaraan pemilu yang lebih baik lagi kedepannya.

"Memberi masukan pada KPU untuk lebih optimal melakukan sosialisasi tata cara pencoblosan dan syarat suara sah kepada masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan," tutur Desi. (g1)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Ditanggapi

Yogyakarta, 29 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005